



PENDAMPINGAN PENENTUAN WILAYAH PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMETAAN SPASIAL DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Pahrul Idham Kaliky¹, Andiah Nurhaeny²

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura¹, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pattimura²

e-mail: andiah.nurhaeny@lecturer.unpatti.ac.id

Diterima: 30/6/2026; Direvisi: 9/7/2026; Diterbitkan: 21/7/2026

ABSTRAK

Pengelolaan data kemiskinan yang masih terpisah antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat karena belum mampu memberikan gambaran kewilayahan yang terpadu sebagai dasar penentuan prioritas intervensi. Kondisi tersebut mendorong pelaksanaan kegiatan pendampingan bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk menyusun wilayah prioritas melalui integrasi data kemiskinan multidimensi dengan pendekatan spasial. Pendampingan dilaksanakan secara partisipatif melalui harmonisasi data dan indikator lintas OPD, verifikasi informasi sektoral, analisis kemiskinan multidimensi, penyusunan peta tematik dan peta komposit, serta evaluasi bersama mitra. Kegiatan ini menghasilkan basis data kemiskinan multidimensi yang terintegrasi, kesepakatan indikator lintas OPD, dan peta komposit sebagai acuan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Berdasarkan analisis komposit, Kecamatan Huamual, Huamual Belakang, Seram Barat, dan Taniwel ditetapkan sebagai wilayah Prioritas I penanggulangan kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi data multidimensi dan pendekatan spasial tidak hanya meningkatkan kualitas identifikasi wilayah prioritas, tetapi juga memperkuat koordinasi antarlembaga serta mendorong penerapan *evidence-based planning* dan *spatial-based planning* dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terpadu, adaptif, dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Kemiskinan Multidimensi, Pemetaan Spasial, Wilayah Prioritas

ABSTRACT

Fragmented poverty data management across Regional Government Organizations (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) has become a major challenge in formulating poverty alleviation policies in West Seram Regency, as it has not provided an integrated spatial perspective for determining priority intervention areas. This condition prompted the implementation of a community assistance program for the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/TKPKD) to identify priority areas through the integration of multidimensional poverty data and spatial analysis. The assistance was conducted using a participatory approach involving data and indicator harmonization across OPDs, verification of sectoral data, multidimensional poverty analysis, thematic and composite mapping, and joint evaluation with project partners. The program resulted in an integrated multidimensional poverty database, a consensus on cross-sectoral indicators, and a composite priority map that serves as a reference for preparing the Regional Poverty Alleviation Plan



(Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah/RPKD). Based on the composite analysis, Huamual, Huamual Belakang, Seram Barat, and Taniwel Districts were identified as Priority I areas for poverty alleviation. These findings demonstrate that integrating multidimensional poverty data with spatial analysis not only improves the identification of priority intervention areas but also strengthens inter-agency coordination and promotes the implementation of evidence-based planning and spatial-based planning to support more integrated, adaptive, and targeted poverty alleviation policies.

Keywords: *Multidimensional Poverty, Spatial Mapping, Priority Areas*

PENDAHULUAN

Perencanaan penanggulangan kemiskinan semakin dihadapkan pada kebutuhan untuk menghasilkan keputusan yang tidak hanya akurat secara administratif, tetapi juga mampu merepresentasikan kondisi sosial masyarakat pada tingkat wilayah yang lebih rinci. Kompleksitas tersebut muncul karena kemiskinan berkembang melalui interaksi berbagai dimensi kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga akses terhadap infrastruktur dasar dan perlindungan sosial. Kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) turut memperkuat arah pembangunan yang menempatkan penghapusan kemiskinan sebagai agenda utama sehingga pemerintah daerah dituntut mengembangkan mekanisme perencanaan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis bukti. Dalam konteks tersebut, penggunaan data yang akurat menjadi prasyarat agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat.

Situasi tersebut juga menjadi tantangan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Data publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat (2025) memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi isu strategis pembangunan daerah sehingga memerlukan upaya penanganan yang lebih terarah melalui pemanfaatan informasi yang mampu menggambarkan kondisi setiap wilayah secara komprehensif. Pada praktiknya, penyusunan program masih banyak bertumpu pada data sektoral yang dikelola secara terpisah oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Konsekuensinya, proses penentuan lokasi prioritas sering kali menggunakan dasar informasi yang berbeda sehingga sinkronisasi program antarinstansi belum berlangsung secara optimal.

Pendekatan yang hanya berorientasi pada ukuran moneter semakin dipandang kurang memadai untuk menjelaskan variasi karakteristik kemiskinan antardaerah. Perspektif kemiskinan multidimensi menawarkan cara pandang yang lebih utuh karena mengakomodasi berbagai bentuk deprivasi yang dialami masyarakat pada aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan standar hidup secara bersamaan (Kause & Fithriyah, 2024; Kumar et al., 2023). Penggabungan berbagai indikator tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai akar permasalahan dibandingkan apabila hanya menggunakan satu kelompok indikator. Oleh sebab itu, kebutuhan terhadap integrasi data lintas dimensi menjadi semakin penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsif terhadap karakteristik wilayah.

Perkembangan teknologi geospasial memberikan peluang untuk menerjemahkan informasi multidimensi tersebut ke dalam bentuk spasial sehingga distribusi kemiskinan dapat dipahami secara lebih jelas. Pemanfaatan citra satelit, *point of interest*, *machine learning*, *deep learning*, dan metode *small area estimation* telah menunjukkan kemampuan dalam meningkatkan ketelitian pemetaan hingga skala wilayah yang lebih kecil (Prasetyo et al., 2023; Rizqina et al., 2023). Analisis spasial juga memperlihatkan pola pengelompokan kemiskinan



yang sulit dikenali melalui analisis statistik konvensional sehingga wilayah yang membutuhkan intervensi dapat diidentifikasi secara lebih objektif (Santoso et al., 2022; Kumar et al., 2023). Sejalan dengan perkembangan tersebut, implementasi *evidence-based planning* dan *spatial-based planning* semakin memperoleh perhatian karena mampu memperkuat efektivitas penyusunan program pembangunan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) sekaligus meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah (Widodo & Herlambang, 2024; Herlambang & Anam, 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar kajian yang telah dipublikasikan masih menempatkan analisis kemiskinan multidimensi, pemetaan spasial, maupun evaluasi kebijakan sebagai pembahasan yang berdiri sendiri. Pendekatan tersebut menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi belum banyak memberikan gambaran mengenai bagaimana proses integrasi data lintas OPD dapat diwujudkan melalui mekanisme pendampingan yang menghasilkan satu acuan spasial bersama. Padahal, efektivitas kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbagai instansi dalam menyepakati indikator, mengintegrasikan sumber data, serta menggunakan dasar informasi yang sama selama proses perencanaan berlangsung (Santoso et al., 2023; Supriatno et al., 2026). Ruang inilah yang masih relatif jarang dibahas dalam literatur sehingga membuka peluang pengembangan model pendampingan yang lebih aplikatif bagi pemerintah daerah.

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memanfaatkan analisis spasial sebagai alat visualisasi wilayah prioritas, tetapi juga mengembangkan mekanisme integrasi data konsumsi dan enam dimensi nonkonsumsi melalui proses kolaboratif antar-OPD. Perbedaan utama pendekatan ini dibandingkan publikasi sebelumnya terletak pada penyatuan proses harmonisasi indikator, verifikasi data lintas sektor, analisis multidimensi, dan penyusunan peta komposit ke dalam satu model pendampingan yang menghasilkan acuan bersama bagi seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, keluaran kegiatan tidak berhenti pada penyediaan informasi spasial, melainkan menghasilkan instrumen perencanaan yang dapat langsung dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan daerah. Karakteristik tersebut memperlihatkan potensi model ini untuk direplikasi pada wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa (Gai et al., 2023; Yakandawala, 2026).

Atas dasar kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk mendampingi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menyusun wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan berbasis pemetaan spasial melalui integrasi data multidimensi lintas OPD. Proses pendampingan diharapkan menghasilkan peta prioritas yang dibangun berdasarkan kesepakatan indikator bersama, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menerapkan *evidence-based planning* dan *spatial-based planning*. Selain memberikan dukungan terhadap penyusunan kebijakan yang lebih terarah, pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadi model kolaborasi yang meningkatkan konsistensi perencanaan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pendampingan partisipatif yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Seluruh perangkat daerah berperan sesuai dengan kewenangannya dalam menyediakan, memverifikasi, dan menyepakati data kemiskinan yang digunakan selama proses pendampingan. Kolaborasi tersebut dirancang agar setiap tahapan menghasilkan dasar informasi yang dapat diterima bersama sebagai acuan penyusunan

wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini menempatkan proses koordinasi lintas OPD sebagai bagian penting dalam membangun keseragaman pemahaman terhadap indikator yang digunakan.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan identifikasi kebutuhan data, dilanjutkan dengan pengumpulan dan verifikasi data sektoral yang berasal dari masing-masing OPD. Data yang telah diverifikasi kemudian diintegrasikan berdasarkan perspektif konsumsi dan enam dimensi nonkonsumsi yang mencakup ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan sosial. Selanjutnya dilakukan penyamaan persepsi terhadap indikator, pengolahan data menggunakan format rekapitulasi, lembar verifikasi indikator, matriks analisis wilayah prioritas, serta perangkat lunak pengolahan data dan pemetaan spasial, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan peta tematik dan peta komposit sebagai dasar identifikasi wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan. Hasil analisis selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori prioritas wilayah sesuai karakteristik permasalahan yang teridentifikasi pada setiap kecamatan.

Tahap akhir difokuskan pada validasi hasil melalui forum bersama yang melibatkan seluruh OPD untuk menelaah kembali kesesuaian data, indikator, serta hasil pemetaan yang telah disusun. Proses ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan bahwa wilayah prioritas yang dihasilkan telah mencerminkan kondisi lapangan dan dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Setiap masukan yang diperoleh selama proses validasi digunakan untuk menyempurnakan hasil analisis sebelum ditetapkan sebagai dokumen pendukung perencanaan daerah. Dengan tahapan tersebut, seluruh proses pendampingan berlangsung secara sistematis, terdokumentasi, dan menghasilkan keluaran yang selaras dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam penyusunan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Pendampingan Penyusunan Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan pendampingan menghasilkan kesepakatan bersama antarperangkat daerah mengenai penggunaan data kemiskinan multidimensi sebagai dasar penyusunan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menggunakan indikator yang sama melalui proses integrasi data sektoral, verifikasi, dan validasi sehingga terbentuk satu basis informasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama. Kesepakatan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan analisis spasial dan klasifikasi wilayah prioritas pada setiap kecamatan. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan pendampingan bersama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan Gambar 1, kegiatan pendampingan melibatkan perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan, meliputi unsur perencanaan, sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, serta perumahan dan kawasan permukiman. Forum tersebut menghasilkan penyelarasan indikator, mekanisme pengelolaan data, dan prosedur analisis yang digunakan secara bersama selama penyusunan wilayah prioritas. Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam proses identifikasi kondisi kemiskinan pada setiap dimensi pembangunan. Ringkasan hasil identifikasi yang diperoleh selama pendampingan disajikan pada Tabel 1.

Hasil Identifikasi Dimensi Kemiskinan

Identifikasi dilakukan terhadap perspektif konsumsi dan enam dimensi nonkonsumsi yang mencakup ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan sosial. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa setiap dimensi menggambarkan karakteristik permasalahan yang berbeda sehingga seluruh indikator digunakan secara bersama dalam penyusunan analisis wilayah prioritas. Informasi yang diperoleh pada tahap ini menjadi dasar penyusunan analisis komposit tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing dimensi. Ringkasan hasil identifikasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Identifikasi Dimensi Kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat

Dimensi	Temuan Utama
Konsumsi	Persentase penduduk miskin masih mencapai 22,31% disertai tingkat keparahan kemiskinan yang relatif tinggi.
Ketenagakerjaan	Kesempatan kerja formal masih terbatas dengan proporsi tenaga kerja formal sebesar 12,83%.
Pendidikan	Rata-rata lama sekolah sebesar 9,59 tahun dan angka partisipasi murni SMA sebesar 69,61%.
Kesehatan	Masih ditemukan <i>unmet need</i> keluarga berencana, prevalensi <i>stunting</i> , <i>underweight</i> , serta cakupan imunisasi dasar yang belum optimal.
Infrastruktur Dasar	Akses air minum, sanitasi, listrik, dan rumah layak huni belum merata pada kelompok masyarakat miskin.
Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan dan sarana pendukung produksi masih memerlukan penguatan pada beberapa wilayah.
Sosial	Perlindungan sosial belum menjangkau seluruh masyarakat miskin dan ketergantungan terhadap bantuan sosial masih ditemukan.

Berdasarkan Tabel 1, hasil identifikasi memperlihatkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak hanya tergambar melalui indikator konsumsi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai dimensi pembangunan lainnya. Seluruh informasi tersebut digunakan sebagai masukan dalam penyusunan analisis komposit sehingga setiap kecamatan



dievaluasi menggunakan indikator yang sama. Tahap identifikasi ini menghasilkan himpunan data yang selanjutnya digunakan untuk menyusun klasifikasi wilayah prioritas secara terpadu. Hasil analisis komposit tersebut disajikan pada bagian berikutnya.

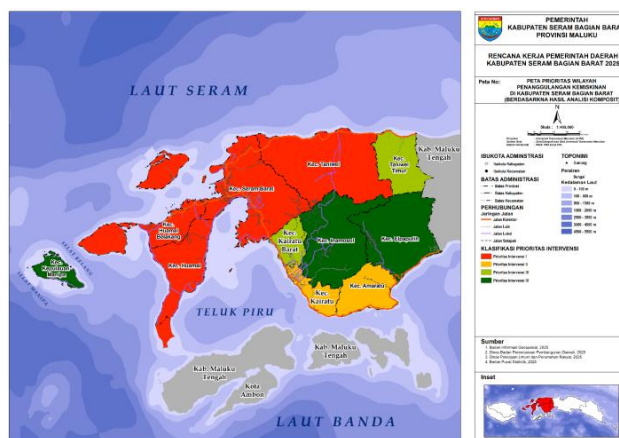
Hasil Analisis Komposit Wilayah Prioritas

Analisis komposit dilakukan dengan mengintegrasikan hasil identifikasi pada perspektif konsumsi dan seluruh dimensi nonkonsumsi sehingga diperoleh klasifikasi prioritas untuk setiap kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pendekatan ini memungkinkan setiap wilayah dinilai berdasarkan akumulasi kondisi yang muncul pada berbagai dimensi kemiskinan, bukan hanya berdasarkan satu indikator tertentu. Hasil analisis menghasilkan klasifikasi Prioritas I sampai Prioritas IV sebagai dasar penyusunan peta wilayah prioritas. Ringkasan hasil analisis komposit disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Analisis Komposit Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat

Kecamatan	Konsumsi	Dimensi Nonkonsumsi*	Prioritas Komposit
Huamual	Prioritas I	Dominan Prioritas I	Prioritas I
Huamual Belakang	Prioritas I	Dominan Prioritas I	Prioritas I
Seram Barat	Prioritas I	Dominan Prioritas I	Prioritas I
Taniwel	Prioritas II	Dominan Prioritas II	Prioritas I
Kairatu	Prioritas III	Beragam	Prioritas II
Amalatu	Prioritas IV	Beragam	Prioritas II
Kairatu Barat	Prioritas IV	Beragam	Prioritas III
Taniwel Timur	Prioritas IV	Beragam	Prioritas III
Inamosol	Prioritas IV	Beragam	Prioritas IV
Kepulauan Manipa	Prioritas IV	Beragam	Prioritas IV
Elpaputih	Prioritas IV	Beragam	Prioritas IV

Berdasarkan Tabel 2, hasil analisis komposit menunjukkan bahwa Kecamatan Huamual, Huamual Belakang, Seram Barat, dan Taniwel termasuk dalam kategori Prioritas I berdasarkan hasil integrasi seluruh dimensi yang dianalisis. Kecamatan lainnya berada pada kategori Prioritas II, III, dan IV sesuai dengan akumulasi kondisi yang diperoleh dari masing-masing indikator. Klasifikasi tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta komposit untuk memudahkan identifikasi sebaran wilayah prioritas pada tingkat kecamatan. Visualisasi hasil analisis komposit tersebut ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat.

distribusi kategori prioritas dapat diamati pada seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Peta tersebut memuat klasifikasi yang sama dengan hasil analisis komposit sehingga memberikan representasi spasial terhadap sebaran prioritas penanggulangan kemiskinan pada setiap kecamatan. Visualisasi ini melengkapi hasil klasifikasi yang telah diperoleh pada tahap analisis komposit dan menjadi bagian dari luaran kegiatan pendampingan.

Luaran Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan menghasilkan beberapa luaran yang digunakan sebagai pendukung penyusunan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Luaran tersebut mencakup keluaran berupa data, informasi spasial, dokumen pendukung, dan penguatan koordinasi antarperangkat daerah yang diperoleh selama seluruh tahapan kegiatan. Seluruh luaran disusun berdasarkan hasil identifikasi dan analisis komposit yang telah dilakukan sehingga membentuk satu kesatuan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Ringkasan luaran kegiatan pendampingan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Luaran Utama Kegiatan Pendampingan

No Luaran	Pemanfaatan
1 Basis data kemiskinan multidimensi	Acuan analisis seluruh perangkat daerah
2 Peta tematik setiap dimensi	Identifikasi wilayah prioritas sektoral
3 Peta komposit wilayah prioritas	Dasar penentuan Prioritas I–IV
4 Rekomendasi wilayah prioritas	Penyusunan RPKD
5 Peningkatan kapasitas perangkat daerah	Penguatan perencanaan berbasis data
6 Kesepakatan indikator lintas sektor	Sinkronisasi program antarperangkat daerah

Berdasarkan Tabel 3, kegiatan pendampingan menghasilkan enam luaran utama yang meliputi basis data kemiskinan multidimensi, peta tematik, peta komposit, rekomendasi wilayah prioritas, peningkatan kapasitas perangkat daerah, dan kesepakatan indikator lintas



sektor. Seluruh luaran tersebut telah disusun dan digunakan sebagai dokumen pendukung dalam proses penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil tersebut melengkapi keluaran yang diperoleh sejak tahap identifikasi hingga analisis komposit sehingga membentuk satu kesatuan hasil kegiatan pendampingan. Uraian lebih lanjut mengenai makna dan implikasi dari temuan tersebut dibahas pada bagian pembahasan.

Pembahasan

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa efektivitas penentuan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada ketersediaan data, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan berbagai informasi sektoral ke dalam satu kerangka analisis yang dapat digunakan bersama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa proses pengambilan keputusan akan lebih berkualitas apabila setiap perangkat daerah menggunakan indikator yang telah diverifikasi dan disepakati sehingga mengurangi perbedaan interpretasi dalam menetapkan sasaran program. Dengan demikian, nilai utama dari kegiatan pendampingan ini tidak semata-mata terletak pada penyusunan peta prioritas, melainkan pada terbentuknya mekanisme pengelolaan informasi yang lebih sistematis sebagai dasar perencanaan pembangunan. Pemaknaan tersebut sejalan dengan konsep *evidence-based planning* yang menempatkan data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi utama dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran (Nastoto, 2024; Putri et al., 2024).

Pendekatan yang dikembangkan melalui kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu indikator. Variasi kondisi antarkecamatan menunjukkan adanya kombinasi berbagai bentuk deprivasi yang saling memengaruhi sehingga tingkat kerentanan suatu wilayah tidak selalu sejalan dengan kondisi konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan multidimensi memberikan ruang analisis yang lebih komprehensif karena mampu menangkap keterkaitan antara aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kondisi sosial yang membentuk karakteristik kemiskinan pada setiap wilayah. Perspektif tersebut sesuai dengan kerangka *multidimensional poverty* yang dikemukakan Dirksen dan Alkire (2025), yang menegaskan bahwa pemahaman terhadap kemiskinan memerlukan integrasi berbagai dimensi kesejahteraan agar intervensi kebijakan dapat disusun secara lebih proporsional sesuai kebutuhan masyarakat.

Implikasi penting dari temuan tersebut adalah bahwa penetapan wilayah prioritas menjadi lebih representatif ketika mempertimbangkan hubungan antardimensi dibandingkan hanya mengandalkan indikator tunggal. Hasil pendampingan memperlihatkan bahwa karakteristik kemiskinan pada setiap kecamatan memiliki pola yang berbeda sehingga kebutuhan intervensi pembangunan juga tidak dapat disamaratakan. Kondisi ini memperkuat pandangan Gabriela dan Utomo (2023) bahwa variasi tingkat kemiskinan antardaerah dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial, ekonomi, serta ketersediaan layanan dasar yang berkembang pada masing-masing wilayah. Dalam konteks tersebut, analisis multidimensi yang diterapkan pada kegiatan pendampingan tidak hanya menghasilkan klasifikasi wilayah prioritas, tetapi juga menyediakan informasi yang lebih kaya mengenai karakteristik persoalan yang mendasari munculnya kerentanan di setiap kecamatan sehingga dapat menjadi dasar penyusunan program yang lebih adaptif.



Selain memperkuat dimensi substantif kemiskinan, kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa pendekatan spasial memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas interpretasi data pembangunan. Informasi yang divisualisasikan melalui peta tematik memungkinkan hubungan antardimensi kemiskinan diamati secara lebih utuh sehingga pola persebaran wilayah prioritas menjadi lebih mudah dipahami dibandingkan penyajian data dalam bentuk tabulasi semata. Keunggulan tersebut memperlihatkan bahwa pemetaan spasial bukan sekadar media visualisasi, melainkan instrumen analitis yang membantu pemerintah daerah mengenali konsentrasi permasalahan serta menentukan arah intervensi secara lebih tepat. Pemaknaan ini memperluas temuan Widodo dan Herlambang (2024) mengenai kontribusi *Geographic Information System (GIS)* dalam penyajian informasi pembangunan, sekaligus menguatkan hasil penelitian Ningsih et al. (2026) dan Raza dan Khan (2025) yang menunjukkan bahwa integrasi analisis spasial mampu meningkatkan ketepatan identifikasi wilayah rentan serta mendukung penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih berbasis bukti.

Proses pendampingan juga memperlihatkan bahwa keberhasilan penyusunan wilayah prioritas tidak hanya dipengaruhi oleh pendekatan analitis yang digunakan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam membangun koordinasi lintas sektor. Penyamaan indikator, verifikasi data, dan diskusi bersama antarperangkat daerah menjadi tahapan yang memungkinkan setiap instansi memiliki pemahaman yang sama terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengetahuan dan membangun kesepakatan terhadap informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Interpretasi ini mendukung pandangan Nur (2025) bahwa penguatan kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, sekaligus mengonfirmasi temuan Setiawati et al. (2025) yang menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi prasyarat untuk menghasilkan implementasi kebijakan daerah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Temuan lain yang mengemuka adalah bahwa pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pendampingan memberikan nilai strategis ketika diposisikan sebagai bagian dari tata kelola data, bukan hanya sebagai sarana visualisasi informasi. Integrasi data multidimensi dengan pemetaan spasial menghasilkan basis informasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai perangkat daerah sehingga proses penyusunan program menjadi lebih konsisten dan mengurangi potensi perbedaan interpretasi antarsektor. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa teknologi memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar mendukung pengolahan data, yakni sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi, sinkronisasi informasi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Setiawan dan Soraya (2025) mengenai kontribusi inovasi digital terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta sejalan dengan Dahlan et al. (2026) yang menunjukkan bahwa transformasi digital dalam perencanaan pembangunan mampu meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, penelitian Bandjar dan Nurhaeny (2026) telah membuktikan bahwa pendampingan pengelolaan data spasial terintegrasi melalui pengembangan *WebGIS* mampu memperkuat tata kelola informasi pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Kegiatan pendampingan pada penelitian ini memperluas ruang lingkup tersebut melalui integrasi indikator kemiskinan multidimensi, harmonisasi data lintas OPD, penyusunan analisis komposit, serta pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (*RPKD*), sehingga teknologi tidak hanya berfungsi sebagai media



pengelolaan informasi, tetapi juga sebagai perangkat yang mendukung penyusunan kebijakan pembangunan secara lebih sistematis.

Kontribusi utama kegiatan pendampingan ini terletak pada keberhasilannya menghubungkan penguatan kelembagaan, analisis kemiskinan multidimensi, dan pemanfaatan pendekatan spasial ke dalam satu mekanisme perencanaan yang saling melengkapi. Berbeda dengan penelitian Gabriela dan Utomo (2023) yang lebih menekankan karakteristik kemiskinan antardaerah, Widodo dan Herlambang (2024) yang berfokus pada pemanfaatan *Geographic Information System (GIS)* dalam penyajian informasi pembangunan, maupun Bandjar dan Nurhaeny (2026) yang mengembangkan integrasi data spasial melalui *WebGIS*, kegiatan pendampingan ini memperlihatkan bahwa ketiga aspek tersebut dapat diintegrasikan secara simultan untuk mendukung penetapan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan. Integrasi tersebut menghasilkan tidak hanya peta wilayah prioritas, tetapi juga mekanisme penyelarasan data, penyamaan indikator, serta penguatan koordinasi antarlembaga yang mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam meningkatkan kualitas penyusunan *RPKD*, sekaligus memberikan penguatan konseptual bahwa penerapan *evidence-based planning* dan *spatial-based planning* akan lebih efektif apabila didukung oleh integrasi data multidimensi, kolaborasi lintas sektor, dan tata kelola informasi yang terbangun secara sistematis.

KESIMPULAN

Pendampingan penentuan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan bahwa integrasi data kemiskinan multidimensi dengan pendekatan spasial mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penyediaan dasar pengambilan keputusan yang lebih terpadu. Harmonisasi indikator lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mendukung penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang lebih responsif terhadap karakteristik setiap wilayah. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan *evidence-based planning* dan *spatial-based planning* memberikan dasar yang lebih sistematis dalam menetapkan prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan. Kontribusi utama kegiatan ini terletak pada penguatan tata kelola perencanaan melalui integrasi data multidimensi, analisis spasial, dan kolaborasi lintas sektor sebagai satu kesatuan proses pengambilan keputusan.

Implikasi kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif tersebut berpotensi menjadi praktik baik (*best practice*) bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan bukti. Penerapannya di wilayah lain perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal, didukung pembaruan data secara berkala, serta diperkuat melalui kolaborasi antarlembaga. Dari sisi akademik, hasil kegiatan ini memperkaya model pendampingan yang mengintegrasikan analisis multidimensi dan pemetaan spasial dalam perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan mengembangkan model ini melalui sistem pendukung keputusan dan teknologi geospasial yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan *artificial intelligence*, untuk meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, A. R. (2024). *Pengaruh konektivitas terhadap kemiskinan multidimensi Indonesia* (Skripsi). Universitas Andalas.



- Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat. (2025). *Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat. <https://sbbkab.bps.go.id/publication/2025/02/28/a28edbb90138db801bc26e71/kabupaten-seram-bagian-barat-dalam-angka-2025.html>
- Bandjar, A., & Nurhaeny, A. (2026). Pendampingan Pengelolaan Data Spasial Terintegrasi melalui Pengembangan WebGIS Sistem Satu Data Peta di Kabupaten Seram Bagian Barat. *COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 964–974. <https://doi.org/10.51878/community.v6i2.10369>
- Dahlan, D., Putri, I., & Fathir, F. (2026). Inovasi dan teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah yang berdampak. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 41–48. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/taroa/article/view/5794>
- Dirksen, J., & Alkire, S. (2025). Multidimensional poverty: Measurement, analysis, applications. In *Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics* (pp. 1–42). Springer Nature Switzerland. https://link.springer.com/rwe/10.1007/978-3-319-57365-6_182-2
- Gabriela, P., & Utomo, A. P. (2023). Analisis spasial pengaruh infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi terhadap kemiskinan Pulau Jawa 2021. In *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 407–416. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1672>
- Gai, A. M., Witjaksono, A., Sai, S. S., Wulandari, L. K., Jenahu, G. R., Levigo, V., & Antonius, P. (2023). Kemiskinan berbasis *sustainable livelihood* di pedesaan sekitar destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. *Prosiding SEMSINA*, 4(2), 96–100. <https://doi.org/10.36040/semsina.v4i2.8144>
- Herlambang, B. A., & Anam, A. K. (2025). Pemetaan sebaran tingkat kemiskinan berbasis sistem informasi geografis di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023–2025. *Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Informatika*, 4(3), 19–27. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jtmei/article/view/5784>
- Kause, J., & Fithriyah, F. (2024). Analisis determinan kemiskinan multidimensi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 4(2), 115–127. <https://doi.org/10.23969/jrie.v4i2.98>
- Kumar, S., Chakraverty, S., & Sethi, N. (2023). Multidimensional poverty: CMPI development, spatial analysis and clustering. *Social Indicators Research*, 169(1), 647–670. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-023-03181-y>
- Lamagoa, F., Badu, F. D. P., Abdul, S. N., & Hakim, M. (2025). Implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo: Analisis model George C. Edward III. *Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS)*, 2(2), 119–130. <https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/P-JIAMS/article/view/412>
- Nastoto, E. P. S. (2024). *Membangun kebijakan dan regulasi berkualitas dengan pendekatan evidence-based policy*. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. https://www.babelprov.go.id/artikel_detil/membangun-kebijakan-dan-regulasi-berkualitas-dengan-pendekatan-evidence-based-policy
- Ningsih, R. A., Ghofur, A., & Lutfi, A. (2026). Pemetaan tingkat kemiskinan menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) berdasarkan data BPS di Kabupaten Bondowoso. In *Proceeding of Informatics Collaborations and Dessimenation Meeting*, 2(1), 8–14. <https://infocoding.apsi-ptma.org/index.php/proceeding/article/view/51>



- Nur, A. Y. B. (2025). *Analisis kontribusi reformasi birokrasi terhadap kapasitas organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Polewali Mandar: Kasus pengentasan kemiskinan* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/54019/>
- Prasetyo, R. B., Ridho, H. C. L. A., & kolega. (2023). Small area estimation of multidimensional poverty in East Java Province using satellite imagery. *Proceedings of the International Conference on Data Science and Official Statistics (ICDSOS)*.
<https://doi.org/10.34123/icdsos.v2023i1.417>
- Putri, N. R. T., Rachmawati, N. F., Nayotama, A. F., & Harmansyah, P. D. (2024). Musyawarah perencanaan pembangunan dengan optimalisasi *evidence-based policy*: Kasus penurunan kemiskinan. *Jurnal Kapit*. <https://doi.org/10.47134/jksp.v1i1.8>
- Raza, S. H., & Khan, L. (2025). Beyond numbers: Mapping poverty disparities in Pakistan through a spatial lens. *Applied Spatial Analysis and Policy*, 18(1), Article 28.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s12061-024-09626-2>
- Rizqina, P. S., Wijayanto, A. W., & Setia, P. (2023). Multi-source satellite imagery and point of interest data for poverty mapping in East Java, Indonesia: Machine learning and deep learning approaches. *Computers, Environment and Urban Systems*.
<https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2023.101953>
- Santoso, E. B., Siswanto, V. K., & Setyaningsih, Y. (2023). Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tuban melalui integrasi program antar OPD. *Sewagati*, 7(1), 113–129. <https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/447>
- Santoso, K. N., Abiyyi, F., & Marselino, A. R. K. (2022). Analisis spasial kemiskinan pada masa pemulihan pandemi Covid-19 di Jawa Barat tahun 2021. *Jurnal Statistika dan Aplikasinya*, 6(2), 288–299. <https://doi.org/10.21009/JSA.06214>
- Setiawati, I. R., Tebawo, A., Hasan, R., Muchlisi, Z., Rezki, N. N., Sahar, S., ... & Kasim, U. (2025). Evaluasi kebijakan pemerintah daerah terkait penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Formasi: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 24–37.
<https://ojs.brida.sultraprov.go.id/index.php/formasi/article/view/60>
- Supriatno, E., Pahdepie, F., Salam, R., & Andriansyah, A. (2026). Konstruksi kebenaran dalam *evidence-based policy making*: Analisis wacana kritis atas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(4), 1814–1824. <https://ejurnal.man4kotapekanbaru.sch.id/takuana/article/view/346>
- Widodo, A., & Herlambang, B. A. (2024). Sistem Informasi Geografis sebaran stunting dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. *Jurnal Penelitian Sistem Informasi (JPSI)*, 2(1), 55–63. <https://doi.org/10.54066/jpsi.v1i4.1457>
- Yakandawala, I. (2026). Geospatial analysis of subnational poverty dynamics: A spatial and temporal framework for *evidence-based policy*. *Mindoro Journal of Social Sciences and Development Studies*, 3(1), 34–44. <https://journal.omsc.edu.ph/mjssds/article/view/124>